



Judul	: Danantara di Persimpangan Menuju Jalur Temasek atau Jalur IMDB
Tanggal	: Minggu, 02 Maret 2025
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 3

INVESTASI NEGARA

Danantara di Persimpangan Menuju Jalur Temasek atau Jalur IMDB

Dalam 18 tahun terakhir saja, Indonesia sudah tiga kali membentuk lembaga pengelola dana investasi negara. Lembaga terbaru, Daya Anugraha Nusantara atau Danantara, diumumkan Presiden Joko Widodo pada Subianto.

Harapannya, Danantara menyusul jejak lembaga pengelola dana investasi negara atau *sovereign wealth fund* (SWF) terbesar, Government Pension Fund Global (GPFG) Norwegia, atau yang terkenal di kawasan, Temasek Singapura. Di sisi lain, ada kekhawatiran Danantara malah menyusul IMDB Malaysia yang menjadi ladang korupsi.

Danantara adalah percobaan ketiga RI setelah Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dibentuk pada 2007, lalu ditutup pada 2015. Selanjutnya, ada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang lebih dikenal sebagai INA.

PIP hingga Danantara dibentuk dengan harapan mulia. Syaratnya, dijalankan dengan benar.

Banyak negara telah memetik manfaat SWF. Sebut saja beberapa contoh di antaranya ialah Norwegia dan Singapura. Norwegia memiliki kekayaan minyak bumi, tetapi tidak mau bergantung pada penghasilan dari ekspor karena minyak satu saat akan habis. Wallahai, SWF dibentuk untuk menampung uang hasil ekspor minyak. Oslo menggunakan bunga dari bunga tabungan itu untuk berbagai program pemerintah.

Sementara Temasek dibentuk pada 1974 untuk menjalankan pengelolaan salam Pemerintah Singapura di berbagai

perusahaan. Kini, Temasek di peringkat ke-3 di antara SWF Singapura.

Pemilik kelolaan terbesar adalah GIC diikuti Central Provident Fund (CPF). GIC menginvestasikan uang pemerintah ke berbagai perusahaan di luar negeri. CPF mengelola dana pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara Temasek memegang saham di berbagai perusahaan Singapura.

Lembaga gagal

Tak semua SWF sukses seperti di Norwegia dan Singapura. Menggunakan pola seperti Norwegia, SWF Angola bangkrut dan dijadikan bahanakan korupsi oleh keluarga Presiden Jose Eduardo Dos Santos.

“Ia menunjuk anaknya, Isabel Dos Santos, sebagai kepala SWF. Akhirnya, lembaga itu ditutup secara dengan korupsi dan konflik kepentingan. Hal pertama yang harus dipastikan di setiap SWF adalah kejelasan sumber-sumber daranya,” kata Dina Prapto Raharja, kala diluncurkan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dina, melalui lembaga kajinya, Synergy, mencatat sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), Synergy menemukan bahwa bukananya menghasilkan laba, BUMN-BUMN ini justru berutang. Ada BUMN yang berutang gaji pegawai dan tunjangan pensiun para purnawiranya.

Bahkan, ada BUMN yang untuk listrik operasional harian berutang kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ada pula BUMN yang berutang kepada pihak ketiga. Menurut pen-



Muhammad Kholid



Dina Prapto Raharja



Reyhan Noor

SUDUT PANDANG

Negara-negara pembeli produk pertambangan Indonesia, terutama negara-negara maju, mulai berlalu ke energi bersih. Ke depan, harus ada mitigasi penurunan emisi apabila Indonesia ingin menjaga kelangsungan transaksi dengan para importir.

Parameter jelas

Masukan juga diberikan oleh Koordinator Analis LAB 45 Reyhan Noor. SWF di sejumlah negara dapat dilihat berdasar-

menjadi parameter utama. Akan tetapi, ini bukan hanya soal keuntungan yang didapat, melainkan kemampuan pengelolaan yang berkelanjutan.

Kholid mencermati, tipologi SWF di luar negeri terdiri atas tiga model. Model pertama adalah model dana tabungan yang diperlakukan korupsi kerap menjadi penyebab kegagalan SWF. Korupsi menjadi sumber utama dalam keberlanjutan SWF, mengingat jumlah dana yang dikelola sangat besar.

“Bisa kita lihat di kasus IMDB di Malaysia yang gagal memberi manfaat ekonomi. Pengawasan dan transparansi menjadi dua faktor vital dalam mengelola SWF,” ucap Reyhan.

Berdasarkan status hukumnya, SWF bisa berhentikan badan yang berada di bawah tanggung jawabnya atau pemerintahan. GPFG Norwegia, atau perusahaan milik negara untuk mengelola investasi seperti Temasek di Singapura.

Ruang lingkup investasi juga dapat menjadi karakteristik SWF. GPFG, misalnya, hanya boleh berinvestasi di luar negara Norwegia. Lain lagi dengan China Investment Corporation. Ada unit yang ditugaskan untuk menjaga pasar modal domestik di China.

“Selain itu, ada pula SAFE Investment Corporation yang bertugas menjaga risiko kurs mata uang yuan sebagai perpanjangan tangan momenter,” ujar Reyhan.

“Ia menerangkan, ada beberapa faktor kunci bagi SWF untuk dapat dikatakan berhasil atau gagal. Faktor ekonomi

pai dua tahun ini memberi dukungan positif agar orang-orang yang ditunjuk di Danantara dapat bekerja dengan percaya diri,” katanya.

Kholid mencermati, tipologi

SWF di luar negeri terdiri atas tiga model. Model pertama adalah model dana tabungan yang diperlakukan korupsi kerap menjadi penyebab kegagalan SWF. Korupsi menjadi sumber utama dalam keberlanjutan SWF, mengingat jumlah dana yang dikelola sangat besar.

“Bisa kita lihat di kasus IMDB di Malaysia yang gagal memberi manfaat ekonomi. Pengawasan dan transparansi menjadi dua faktor vital dalam mengelola SWF,” ucap Reyhan.

Dari sisi fiskal, pelaksanaan

SWF positif bagi perekonomian karena dapat menambah penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, dampak ekonomi masih bergantung pada realisasi proyek yang diluncurkan. Dalam

pelaksanaannya, badan pengelola investasi di bawah Danantara juga mungkin menghadapi risiko apabila terlalu banyak eksposur kredit yang diberikan entitas BUMN yang sama-sama berada di bawah Danantara.

Mendukung penuh

Pihak yang mendukung penuh Danantara antara lain Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI. Walaupun begitu, Juru Bicara PKS sekaligus anggota Komisi XI DPR, Muhammad Kholid, mengatakan, ada catatan yang diberikan bersama dukungan tersebut.

“Kita ingin minimal setu-

panya dan stabilisasi fiskal. Model ini diterapkan salah satunya di Rusia. Pendapatan dari sumber daya alam dimasukkan ke SWF yang berfungsi sebagai alat penstabil APBN. Ketika pendapatan negara kurang, dana ini yang digunakan membiayai negara.

Model ketiga disebut dana

pembangunan sektor strategis.

Negara menyisihkan dana

APBN dari entitas simbolik fiskal untuk dikelola sebagai instrumen bisnis. Berhubungan penggunaan instrumen fiskal berstatus birokratis dan tidak fleksibel, sehingga tidak adaptif sebagai pendorong untuk aksi

korporasi, pengelolaannya di bawah induk utama atau dikenal *superholding*.

“Bagi entitas bisnis, ukuran

penting. Semakin besar entitas, semakin baik kinerja dan efisiensinya. Makin besar pula dana dan dampak investasinya,”

kata Kholid. (DNL/LUK/IRE)